



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. MUHAMMAD MARIO SAID
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. NHK : 488840

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.447.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.227.400.000
2. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 441 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 29.26 m2/29.26 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 6700 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 670.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 667.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI EX250L Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 22.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT/JEEP Tahun 2020, WARISAN Rp. 465.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.136.230.162



F. HARTA LAINNYA	Rp.	53.750.000
Sub Total	Rp.	5.314.380.162
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.314.380.162

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.